

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengetahuan tentang keuangan syariah semakin berkembang seiring bertambahnya kebutuhan manusia yang semakin kompleks. Kemampuan yang dimiliki ini berkaitan dengan kecerdasan pribadi untuk bersikap efektif demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkaitan dengan globalisasi yang tidak dapat kita hindari misalnya dalam hal menentukan keputusan masa depan yang berkaitan dengan keputusan jangka pendek atau pun jangka panjang secara tidak langsung.

Literasi keuangan merupakan suatu hal yang seharusnya menjadi kebutuhan dasar tiap-tiap individu atau masyarakat dalam mengelola keuangan. Hal ini dikarenakan apabila terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan akan menimbulkan masalah dalam keuangan, contoh yang paling konkret adalah terjadinya kesulitan ekonomi. Kesulitan tidak hanya disebabkan oleh pengaruh pendapatan namun juga bisa disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan keuangan (missmanagement). Oleh karena itu, literasi keuangan penting bagi masyarakat agar terhindar dari kesulitan ekonomi, termasuk bagi mahasiswa.

Mahasiswa sebagai generasi muda tidak hanya akan menghadapi kompleksitas yang semakin meningkat dalam produk-produk keuangan, jasa, dan pasar, tetapi mereka juga lebih cenderung harus menanggung risiko keuangan di masa depan yang lebih dari masyarakat lainnya. Karena

masyarakat menganggap mahasiswa mempunyai pengetahuan tentang apapun termasuk keuangan.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Literasi keuangan merupakan pengetahuan, keterampilan, dan keyakinan yang mempengaruhi sikap dan perilaku untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam rangka mencapai kesejahteraan.² Jadi literasi keuangan tidak terbatas pada pengertian pengetahuan, ketrampilan dan keyakinan akan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan semata, namun sikap dan perilaku pun dapat memberikan pengaruh dalam meningkatkan literasi keuangan yang selanjutnya dapat mendorong terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Sikap dan perilaku keuangan yang bijak tercermin dalam kemampuan seseorang menentukan tujuan keuangan, menyusun perencanaan keuangan, mengelola keuangan dan mampu mengambil keputusan keuangan yang berkualitas dalam menggunakan produk layanan jasa keuangan.

Pengetahuan di bidang pengelolaan keuangan individu seharusnya dimiliki oleh mahasiswa sejak dini. Mahasiswa yang memiliki tingkat literasi yang rendah cenderung berpendapat negatif tentang keuangan dan membuat keputusan yang salah. Mahasiswa yang memiliki literasi keuangan, cenderung mampu membuat keputusan untuk kehidupan dan menerima tanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*, (Revisit 2017), Hal 77

Bagi seorang mahasiswa mempelajari tentang pengelolaan keuangan, produk, layanan jasa keuangan merupakan hal yang mudah. Bahkan beberapa dekade belakangan ini di Indonesia seperti menjadi tren jurusan dan fakultas yang memang intens mempelajari keuangan atau pun ekonomi. Misalnya saja jurusan ekonomi, perbankan, akuntansi, manajemen, dll. yang mempelajari tidak hanya melulu tentang keuangan konvensional tapi juga keuangan syariah. Apalagi dengan berkembangnya teknologi saat ini sangat memudahkan mahasiswa untuk mencari pengetahuan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka.

Akan tetapi kemudahan-kemudahan dalam literasi keuangan tersebut selanjutnya juga harus didukung dengan kemudahan seseorang dalam mengakses lembaga keuangan tersebut. Setelah literasi sudah dimiliki pada generasi muda khususnya mahasiswa, mereka juga diharapkan dapat memiliki keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan serta produk dan layanannya setelah memiliki pengetahuan dan ketrampilan yang memadai. Namun fenomena saat ini adalah setelah mahasiswa cakap terhadap lembaga jasa keuangan tidak semua dapat mengakses layanan keuangan dengan mudah.

Dalam rangka memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, perlu adanya strategi khusus agar keuangan lebih inklusif. Keuangan inklusif adalah kondisi dimana setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas secara

tepat waktu, lancer dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.³

Kegiatan keuangan inklusif menjadi salah satu agenda penting dalam dunia internasional. Di Indonesia Pada tanggal 18 November 2016, Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau disingkat dengan SNKI telah diluncurkan dan diiringi dengan target ambisius, Indeks Keuangan Inklusif ditargetkan menyentuh level 75%. SNKI adalah strategi Nasional yang dituangkan dalam dokumen yang memuat tentang visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengangguran kesejahteraan masyarakat Indonesia.⁴

Dengan adanya program SNKI diharapkan seluruh masyarakat termasuk mahasiswa dapat dengan mudah dalam mengakses layanan lembaga jasa keuangan sesuai yang sesuai dengan kebutuhan. SNKI tidak hanya mempermudah akses lembaga keuangan konvensional saja namun lembaga keuangan syariah. Industri jasa keuangan syariah menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat termasuk juga di Indonesia.

Di awal era 90-an beberapa ekonom dan praktisi mulai menyadari pentingnya penerapan ekonomi Islam dalam perekonomian Indonesia. Sejak saat itu keuangan syariah mulai berkembang. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama pada tahun 1991. Selanjutnya perkembangan sector keuangan

³ Peraturan Presiden No 28 Tahun 2016, *Strategi Nasional Inklusi Keuangan*, (2016), Hal.

⁴ *Ibid.*, Hal 2

non bank syariah dimulai pada tahun 1994 dengan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia yang merupakan induk dari PT Asuransi Takaful Keluarga dan PT Asuransi Takaful Umum, sebagai asuransi syariah pertama. Selanjutnya perkembangan di bidang pasar modal syariah ditandai dengan diterbitkannya produk reksa dana syariah pertama oleh PT Danareksa Investment Management pada tahun 1997.⁵

Semakin kompleksnya keuangan syariah di Indonesia menjadikan perlu mengembangkan literasi. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan dalam mengakselerasi pertumbuhan keuangan syariah di Indonesia adalah melakukan berbagai program yang dapat menyelesaikan berbagai permasalahan. Permasalahan yang dihadapi sektor keuangan syariah antara lain keterbatasan suplai produk syariah, keterbatasan akses akan produk keuangan syariah, masih rendahnya tingkat literasi keuangan syariah dan tingkat utilitas produk keuangan syariah, serta perlunya kebijakan jasa keuangan yang selaras dan dapat saling mendukung perkembangan seluruh sektor keuangan syariah.

Pada tanggal 14 Juli 2017 di Jakarta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga independen penyelenggara system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan, meluncurkan *Revisit* Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (*Refisit* SNLKI) yang merupakan penyesuaian dari strategi sebelumnya yang telah diluncurkan pada tanggal 19 November 2013 oleh

⁵ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2017-2019*, Hal. 2

Presiden Republik Indonesia. Revisit SNLKI ini merupakan pedoman bagi OJK, lembaga jasa keuangan dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan literasi sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016.⁶

Berdasarkan survey yang dilakukan oleh OJK pada 2013, tingkat literasi keuangan penduduk Indonesia dibagi menjadi empat bagian, yaitu *well literate* (21,84%), *sufficient literate* (75,69%), *less literate* (2,06%) dan *not literate* (0,41%).⁷ Dari survey tersebut dapat disimpulkan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih sangat rendah. Hal tersebut dapat dilihat bahwa tingkat masyarakat yang *well literate* masih sebesar (21,84%), artinya masyarakat belum banyak yang sadar dan menggunakan layanan jasa keuangan.

Berdasarkan survey nasional literasi dan inklusi keuangan pada tahun 2016 yang dilakukan oleh OJK, menunjukkan indeks literasi keuangan sebesar 29,66% hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan mengalami kenaikan dari tahun 2013 yang hanya 21,84%. Menariknya pada tahun 2016 literasi keuangan syariah adalah pertama kalinya dilakukan dan hasil survey menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan syariah sebesar 8,11% yang artinya dari 100 orang baru 8 orang saja yang paham akan sector jasa keuangan.⁸

⁶ Agus Sugiarto, *Siaran Pers Revisit Snlki Sebagai Upaya Akselerasi Pencapaian Indeks Literasi dan Inklusi Keuangan*, (Jakarta; 2017), Hal 1

⁷Ojk, [Http://Www.Ojk.Go.Id/Kanal/Edukasi-Dan-PerlindunganKonsumen/Pages/Literasi-Kuangan.aspx](http://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Edukasi-Dan-PerlindunganKonsumen/Pages/Literasi-Kuangan.aspx) Diakses pada Tanggal 22 Maret 2018 Pukul 09.41

⁸ Ojk, *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016*, (Jakarta: Ojk, 2016)

Dalam perkembangannya, industri keuangan syariah di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dibanding negara lain seperti Malaysia dan Gulf Cooperation Council (GCC), yang lebih fokus pada perbankan investasi dan instrumen keuangan syariah. Indonesia memiliki kompleksitas yang melingkupi banyak jenis industri jasa keuangan serta lebih berorientasi pada segmen ritel. Indonesia mempunyai lembaga jasa keuangan syariah dan nasabah keuangan syariah terbesar dalam satu yurisdiksi tunggal, selain adanya pengembangan hal-hal tertentu yang menampilkan karakteristik khas keuangan syariah Indonesia seperti Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dan institusi keuangan mikro syariah informal.

Sampai dengan saat ini Indonesia terus berupaya untuk mengembangkan lembaga keuangan syariah. Walaupun masih relatif kecil di skala nasional, perkembangan industry keuangan syariah Indonesia menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan di kancah global. Beberapa metodepun telah dilakukan bahkan pengenalan keuangan syariah sejak dini.

Namun demikian, pertumbuhan keuangan syariah belum dapat mengimbangi pertumbuhan keuangan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari pangsa pasar (market share) keuangan syariah yang secara keseluruhan masih di bawah 5%. Namun apabila dilihat dari setiap jenis produk syariah, hingga akhir Desember 2016, terdapat beberapa produk syariah yang market share-nya di atas 5%, antara lain aset perbankan syariah sebesar 5,33%, sukuk negara yang mencapai 14,82%, lembaga pembiayaan syariah sebesar 7,24%, lembaga jasa keuangan syariah khusus sebesar 9,93%, dan lembaga keuangan mikro syariah

sebesar 22,26%. Sementara itu, produk syariah yang pangsa pasarnya masih di bawah 5%, antara lain sukuk korporasi yang beredar sebesar 3,99%, nilai aktiva bersih reksa dana syariah sebesar 4,40%, dan asuransi syariah sebesar 3,44%.⁹

Menurut data Bank Dunia (world bank), Indonesia adalah negara ketiga yang mempunyai tingkat literasi keuangan paling lemah setelah India dan Cina. Kondisi tersebut jelas kurang menguntungkan bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebab, tingkat kesejahteraan suatu masyarakat sejalan dengan tingkat pemahaman keuangan dan kedekatan masyarakat terhadap akses keuangan. Karena itu, kebutuhan pengembangan keuangan mikro dan program keuangan inklusif (financial inclusion) yang lebih efektif dan efisien.

Dalam hal ini keuangan inklusif merupakan salah satu instrumen yang menunjang literasi keuangan. Keuangan inklusif merupakan kemampuan perorangan dalam mengakses berbagai produk jasa keuangan yang terjangkau serta sesuai dengan kebutuhannya. Kemampuan ini utamanya berkaitan dengan satu kompleks pemahaman yang meliputi *finansial awareness*, pengetahuan tentang lembaga keuangan dan pengetahuan mengenai berbagai fasilitas yang disediakan lembaga keuangan serta permohonan atas berbagai keuntungan memanfaatkan saluran perbankan pemahaman tersebut masuk dalam indikator masyarakat yang telah *well literate* dalam bentuk literasi keuangan.

⁹ *Ibid.*, Hal 5

Keuangan inklusif merupakan komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. Sistem keuangan inklusif diwujudkan melalui akses masyarakat terhadap layanan keuangan sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonomi dan pada akhirnya membuka jalan untuk keluar dari kemiskinan serta mengurangi kesenjangan ekonomi. Akses yang lebih luas terhadap layanan keuangan merupakan hal penting dalam upaya peningkatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian.¹⁰

Sasaran keuangan inklusif mencakup semua segmen masyarakat berpendapatan rendah, pelaku usaha mikro dan kecil, serta masyarakat yang merupakan lintas kelompok yaitu pekerja migran, wanita, kelompok masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), masyarakat daerah tertinggal, serta kelompok pelajar, mahasiswa dan pemuda.

Survey Global Findex (*Financial Inclusion Index*) yang dirilis pada bulan April 2014 mengungkapkan bahwa 62 persen orang dewasa diseluruh dunia memiliki rekening di bank atau memanfaatkan berbagai macam jenis produk dari lembaga keuangan. Survei ini merupakan rilis kedua dari Global Findex setelah survei yang pertama pada tahun 2011. Global Findex sendiri merupakan

¹⁰ Peraturan Presiden Republik Indonesia, No 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif, Hal 8

organisasi yang mengklaim sebagai penyedia database paling komprehensif didunia dalam bidang keuangan inklusif.

Global Fintex juga menyertakan Indonesia sebagai salah satu Negara survei dimana pada survei yang dilakuakn kepada 1.000 responden di Indonesia pada tahun 2014 menunjukkan bahwa jumlah penduduk diatas 15 tahun yang mempunyai akun diberbagai lembaga keuangan meningkat menjadi 35,9% dari sebelumnya sekitar 19,6% pada tahun 2011. Angka ini masih jauh dari target keuangan inklusif sebesar 50% seperti yang di cita-citakan presiden Joko Widodo dalam nawacita ketujuhnya, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategi ekonomi domestic. Namun demikian, sebuah langkah nyata harus ditempuh untuk mewujudkannya. Salah satunya adalah dengan mengenalkan pentingnya pengetahuan tentang jasa keuangan serta mulai memanfaatkan jasa keuangan tersebut dari usia sekolah.¹¹

Disisi demografi Indonesia berada pada kondisi dimana mayoritas penduduk berada pada usia produktif, yaitu usia muda semakin kecil namun lanjut usia belum banyak. Melimpahnya jumlah penduduk usia produktif ini akan memacu pertumbuhan ekonomi ketingkat yang lebih tinggi sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Keuangan inklusif yang dianggap sebagai salah satu cara agar semua orang dapat menikmati kesejahteraan dengan cara mengakses semua layanan keuangan yang ada harus dimulai dengan langkah nyata. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mulai

¹¹ Tri Achya Ngasuko, *Financial Inclusion dimulai dari Masa Remaja*, Badan Kebijakan Fiscal Kementrian Keuangan, Hal 1.

mengenalkan akan pentingnya pengetahuan mengenai jasa keuangan dari masa remaja di kalangan pelajar.

Kelompok pelajar, mahasiswa dan pemuda tentu mempunyai peran yang penting dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan, karena merekalah generasi yang dianggap dapat meneruskan dan memajukan perekonomian. Kelompok pelajar, mahasiswa dan pemuda diperkirakan mencapai 106,8 juta orang atau 41,87% dari jumlah penduduk Indonesia tahun 2015.¹² Di Indonesia terdapat 693 jumlah perguruan tinggi dan terdapat 689.181 jumlah mahasiswa, dari 36 provinsi di Indonesia, Jawa Timur adalah penyumbang jumlah mahasiswa terbanyak yaitu 128.128 dari 130 perguruan tinggi swasta dan 7 Perguruan tinggi Negeri. Salah satu perguruan tinggi Negeri di Jawa Timur adalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Di IAIN Tulungagung Terdapat 4 fakultas dan 33 jurusan dimana juga terdapat Jurusan Ekonomi Syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas abanyaknya anggapa mengenai pentingnya literasi keuangan dan inklusi dalam menggunakan lembaga keuangan syariah khususnya di kalangan mahasiswa selagu generasi penerus bangsa, hal itulah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan terhadap Minat Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dalam Menggunakan Lembaga Keuangan Syariah”**

¹² *Ibid.*, Hal 1

B. Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan yang perlu diidentifikasi dalam penelitian ini adalah terkait dengan pengaruh literasi keuangan dan inklusif keuangan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan lembaga keuangan syariah pada Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalahnya adalah:

1. Apakah literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung dalam menggunakan lembaga keuangan syariah ?
2. Apakah inklusi keuangan berpengaruh signifikan terhadap minat Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung dalam menggunakan lembaga keuangan syariah ?
3. Apakah literasi keuangan dan inklusif keuangan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap minat Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung dalam menggunakan lembaga keuangan syariah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan antara lain:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh literasi keuangan terhadap minat Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung dalam menggunakan lembaga keuangan syariah.
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh Inklusi keuangan terhadap minat Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung dalam menggunakan lembaga keuangan syariah.
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh literasi keuangan dan inklusif keuangan terhadap minat Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung dalam menggunakan lembaga keuangan syariah.

E. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut.

2. Secara Praktis

Meningkatkan wawasan dan pengetahuan pada semua pihak yang terkait dalam Literasi dan inklusi keuangan terhadap minat menggunakan lembaga keuangan syariah.

3. Secara Individu

Memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penelitian ini berfokus pada variabel Independen/bebas(X) dan variabel dependen/terikat (Y). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah literasi keuangan syariah (X1) dan inklusi keuangan (X2) dan variabel terikatnya (Y) adalah minat mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung dalam menggunakan lembaga keuangan syariah.

2. Batasan Penelitian

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah yang dibahas, maka penulis memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini, penulis membatasi masalah sebagai berikut:

- a) Penelitian ini berfokus pada pengaruh literasi keuangan dan inklusi keuangan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan lembaga keuangan syariah
- b) Objek penelitian ini adalah di Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

Untuk mempermudah dan mengurangi kesalahan dan menafsirkan makna, maka peneliti harus menjelaskan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini. Adapun penegasan istilah-istilah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Literasi keuangan

Literasi keuangan adalah pengetahuan atau kemampuan untuk mengelola keuangan. Menurut OJK literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu mengelola keuangan dengan baik.

2. Inklusi keuangan

Keuangan inklusif didefinisikan sebagai kondisi ketika setiap anggota masyarakat mempunyai akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang berkualitas secara tepat waktu, lancar dan aman dengan biaya terjangkau sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹³

3. Lembaga keuangan syariah adalah

Lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan suatu lembaga keuangan yang prinsip operasionalnya berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang harus terhindar dari unsur riba, gharar, maisir dan akad yang bathil.¹⁴

¹³Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2016, *Strategi Nasional Keuangan Inklusif*, Hal 5

¹⁴ Belajar Ilmu Ekonomi Syariah, *Pengertian Lembaga Keuangan Syariah Dalam System Ekonomi Islam*, [Http://www.ekonomiislam.net](http://www.ekonomiislam.net), Diakses Pada Tgl 07 Juni 2018, Pukul 06.52.

H. Sistematika Skripsi

Penelitian kuantitatif adalah suatu penelitian yang pada dasarnya menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari suatu kerangka teori, gagasan para ahli, maupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan-permasalahan beserta pemecahan-pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (verifikasi) atau penolakan dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Atau dengan kata lain dalam penelitian kuantitatif peneliti berangkat dari paradigma teoritik menuju data, dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori yang digunakan.

Pada umumnya hal-hal yang disajikan dalam skripsi model penelitian kuantitatif bersifat substantif, kompleks dan mendasar, mulai dari isi kajian dengan menggunakan berbagai paradigma teoritik, sampai pada hal-hal yang bersifat teknis-operasional. Karena begitu kompleksnya materi yang akan disajikan, maka sistematika penyusunan laporan penelitian kuantitatif perlu diatur, agar para pembaca laporan penelitian dapat dengan mudah menemukan setiap bagian yang dicari dan dapat dipahami dengan tepat.

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan, secara sistematis susunan skripsi ini adalah sebagai berikut :¹⁵

¹⁵ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, *pedoman penulisan Skripsi*, (Tulungagung: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung, 2017)

1. Bagian awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

2. Bagian Isi

Terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, dan penegasan istilah serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian, dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai rancangan penelitian, sumber data, definisi variabel, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bagian ini berisi tentang deskripsi karakteristik data pada masing-masing variabel dan uraian tentang hasil pengujian *hiposkripsi*.

BAB V : PEMBAHASAN

Pada bagian ini dijelaskan temuan-temuan penelitian yang telah dikemukakan pada hasil penelitian

BAB VI : PENUTUP

Sebagai bab terakhir, bab ini akan menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan, implikasi penelitian dan juga memuat saran-saran bagi pihak yang berkepentingan untuk pengembangan penelitian lebih lanjut.

3. Bagian Akhir

Terdiri dari: daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.